



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 44 / 1 /2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 145);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nomor 225);

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011
Nomor 34);
15. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 91 Tahun 2007
tentang Pembentukan Satuan Kerja Pembina Jasa
Kontruksi Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pejabat Pembuat komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) rancangan Kontrak.
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. menandatangani Kontrak;
4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:

1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pekerjaan dan serah terima barang/jasa.

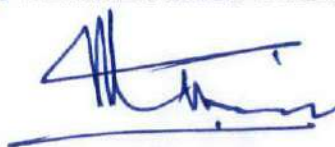
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung masing-masing kegiatan tiap bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Januari 2012

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pemerintahan	
4. Kasubag	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 44 / 1 /2011
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	KET
BAGIAN ADM. KEMASYARAKATAN DAN KESRA					
1	Pemantauan/Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp 124.300.000	Drs. M. NAJIB	Dra. Hj. SULEHARNI	
2	Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp 187.600.000	Drs. M. NAJIB	HARNAS, SE	
3	Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	Rp 170.400.000	Drs. M. NAJIB	USNAWATI, SE	
4	Facilitasi Kegiatan Tadarrus Al Quran	Rp 170.700.000	Drs. M. NAJIB	Dra. Hj. SULEHARNI	
BAGIAN ORTALA					
5	Penyusunan Tupoksi, Penyusunan Angjab, Perhitungan Beban Kerja dan Penyusunan/Bimtek tata naskah dinas	Rp 122.450.000	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	SAHURMA, S.Sos	
6	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 172.800.000	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	KISMAN, S.Sos	
7	Penyusunan laporan Capaian Kinerja Kabupaten dan Lakiip Sekretariat	Rp 73.850.000	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	
8	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Rp 167.250.000	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	JUMIATI, S.Sos	
9	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Fasilitas Penyusunan SOP dan SPP	Rp 113.650.000	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA					
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 9.150.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	IRAWAN KAPENG, S.Sos	
11	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.048.250.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 180.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 75.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp 80.000.000	Drs. JASRUM, M.Si	Drs. JASRUM, M.Si	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.048.250.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	KET
44	Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Rp 14.300.000	NILA SARI, SH	NILA SARI, SH	
45	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 53.025.000	NILA SARI, SH	NILA SARI, SH	
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				
46	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 266.960.000	ABDUL HAKIM BUKARA, SH, MI	ABDUL HAKIM BUKARA, SH, MH	
47	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp 548.720.000	ABDUL HAKIM BUKARA, SH, MI	ABDUL HAKIM BUKARA, SH, MH	
48	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Rp 91.320.000	ABDUL HAKIM BUKARA, SH, MI	ABDUL HAKIM BUKARA, SH, MH	
	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN				
49	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp 71.195.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	MUHAMMAD HADI, SH	
50	Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pengawasan	Rp 167.505.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	ANDI RAJALLANGI, SH, MH	
51	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Rp 74.485.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	ANDI RAJALLANGI, SH, MH	
52	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 49.325.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	MUHAMMAD HADI, SH	
53	Koordinasi Kerjasama Pemmasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 56.190.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	NASIRAH, SH	
54	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 178.160.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	NASIRAH, SH	
55	Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 93.620.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	MUHAMMAD HADI, SH	
56	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peraturan Perundang				
	Undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keceriasan antar Peraturan				
	Perundang-Undangan yang baru	Rp 33.520.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	MUHAMMAD HADI, SH	
57	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 10.000.000	MUHAMMAD YAMIN, SH	NASIRAH, SH	
	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				
58	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp 57.000.000	TAUHIID, SE, MM	TAUHIID, SE, MM	
59	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah	Rp 176.550.000	TAUHIID, SE, MM	TAUHIID, SE, MM	
60	Kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	Rp 89.125.000	TAUHIID, SE, MM	TAUHIID, SE, MM	
61	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp 56.325.000	TAUHIID, SE, MM	TAUHIID, SE, MM	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
62	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Rp 675.000.000	BUSTAMAN LATIF, SE	YUYU WAHYUDDIN, SE	
63	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp 70.000.000	BUSTAMAN LATIF, SE	NURSANNA, S.Sos	
64	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Rp 130.000.000	BUSTAMAN LATIF, SE	BUSTAMAN LATIF, SE	
65	Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Bidang Perekonomian	Rp 75.000.000	BUSTAMAN LATIF, SE	AMIRUDDIN, S.Sos	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	KET
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 851.600.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 178.750.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	IRAWAN KAPENG, S.Sos	
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 1.180.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	IRAWAN KAPENG, S.Sos	
19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Aset	Rp 1.670.850.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
20	Kunjungan Kerja bersama Bupati/Walid Bupati/DPRD/Muspida/ Pejabat Pemerintah tingkat atas				
21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 270.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	IRAWAN KAPENG, S.Sos	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 806.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 430.000.000	Drs. JASRUM, M.Si	Drs. JASRUM, M.Si	
24	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 195.900.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
25	Pemeliharaan Lampu Jalan	Rp 40.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	IRAWAN KAPENG, S.Sos	
26	Pengadaan Lampu Jalan	Rp 87.500.000	Drs. JASRUM, M.Si	Drs. JASRUM, M.Si	
27	Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Keluarga	Rp 39.500.000	Drs. JASRUM, M.Si	Drs. JASRUM, M.Si	
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Keluarga	Rp 128.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 233.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp 1.136.540.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Rp 100.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
32	Pengadaan Pakaiat Dinas KDH/WKDH	Rp 259.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
33	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan				
34	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara Departemen/Lembaga	Rp 235.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
35	Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri				
36	Rapat-Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Rp 255.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
37	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Walid Kepala Daerah	Rp 100.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
38	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 150.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
39	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 600.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
40	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan Penyusunan				
41	Dokumen Perencanaan	Rp 93.500.000			
42	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	Rp 15.600.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
43	Pengaturan dan Penyelenggaraan Jin Usaha Jasa Konstruksi	Rp 30.400.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
44	Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa	Rp 693.840.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
45	Sosialisasi Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi	Rp 22.675.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
46	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Rp 33.910.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	
47	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Rp 42.750.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	MUH. THAMRIN, S.Sos	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	KET
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				
66	Koordinasi Penegasan Batas antar Daerah	Rp 400.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	SAHIRUDDIN	
67	Pengadaan Tanah	Rp 1.475.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	SAHIRUDDIN	
68	Sertifikasi Asset Penda	Rp 3.500.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	SAHIRUDDIN	
69	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp 292.400.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	SAHIRUDDIN	
70	Penyuluhan Tertib Adm. Tanah dan Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp 200.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	ANDRILDHARSYAH F, S.STP	
71	Penyusunan LPPD dan Publikasi ILPPD	Rp 125.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	RAMLAN MAJID, SIP	
72	Fasilitasi Forum Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	Rp 307.600.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	SAHIRUDDIN	
73	Evaluasi Kinerja Kecamatan	Rp 100.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	RAMLAN MAJID, SIP	
74	Fasilitasi dan Koordinasi Pembakuan Nama Rupabumi	Rp 100.000.000	MUH. THAMRIN, S.Sos	ANDRILDHARSYAH F, S.STP	

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1. Sekda		
2. Asisten II		
3. Kabag. P. Pembangunan		
4. Kasub.		

an. BUPATI LUWU UTARA
 1 SEKRETARIS DAERAH,

 MUDJAHIDIN IBRAHIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 44 / 1 / 2011
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KET.
1	AWALUDDIN NASIR	19750614 200604 1 018	PENATA MUDA III.a	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA	
2	BAHARUDDIN	19830906 200901 1 001	PENGATUR MUDA II.a	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA	

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1. Sekda		
2. Asisten II		
3. Kabag Adm. Pembangunan		
4. Bendah		

an. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

MUDJAHIDIN IBRAHIM